

Abstrak

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022, Bappebti membekukan kegiatan usaha PT Rifan Financindo Berjangka dikarenakan telah melanggar aturan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Peraturan terkait perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pialang berjangka dan tanggung jawab perusahaan pialang yang dibekukan izin operasionalnya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap nasabahnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan dan tanggung jawab perusahaan pialang terhadap nasabah dan karyawan akibat pembekuan tersebut. Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang telah melanggar aturan yaitu mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha yang berdasarkan PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka dan tanggung jawab perusahaan pialang terhadap nasabah dan karyawan dengan melakukan perbaikan kegiatan operasional serta menyiapkan dokumen permohonan pencairan pembekuan kegiatan usaha dan tetap menjamin pembayaran upah karyawan sesuai waktu yang telah disepakati.

Kata kunci: Problematika, Tanggung Jawab, Pembekuan, Bappebti.

Abstract

Based on the Decree of the Head of Bappebti Number 01 of 2022 dated March 8, 2022, Bappebti suspended the business activities of PT Rifan Financindo Berjangka because it had violated the rules in carrying out business activities. Regulations related to commodity futures trading are regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading. This study uses a normative juridical research method, with a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). The focus in this research is how to enforce the law against brokerage companies that violate operational activity rules in carrying out futures brokerage business activities and the responsibility of brokerage companies whose operational permits have been suspended by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency for their customers. The purpose of this research is to find out law enforcement by the government against brokerage companies that violate the rules and responsibilities of brokerage companies to customers and employees as a result of the suspension. The results of this study resulted in law enforcement against brokerage companies that have violated the rules, namely receiving administrative sanctions in the form of freezing business activities based on PP No. 9 of 1999 concerning the Implementation of Commodity Futures Trading and the responsibility of brokerage companies to customers and employees by improving operational activities and preparing documents requesting the disbursement of freezing of business activities and continuing to guarantee the payment of employee wages according to the agreed time.

Keywords: *Problems, Responsibilities, Freezing, Bappebti.*